

# KEPRIBADIAN DAN SISTEM SOSIAL SUATU ULASAN INTERAKSIONAL DALAM KONTEKS PSIKOLOGI

Oleh: John S. Nimpoeno

## PENDAHULUAN

Suatu uraian mengenai hubungan antara manusia dengan lingkungannya, khusus antara kepribadian manusia dengan lingkungan sosial, tidak dapat dilepas dari wawasan dan sudut persepsi yang diambil guna mengusahakan uraian tersebut. Namun oleh karena yang menjadi bahan ulasan ialah manusia berikut lingkungan manusiawi pula, maka posisi yang akan dipilih adalah posisi ilmu-ilmu sosial budaya.

Posisi kejadian ini terikat oleh wawasan-wawasan dan kerangka acuan, yang tidak menitikberatkan kebenaran ilmiah (Scientific truth) seperti seringkali diidamkan oleh kaum cendekiawan. Lebih relevan ialah sikap untuk melihat suatu kebenaran ilmiah sebagai hal yang relatif serta juga tentatif (Sullivan, 1933), terutama apabila studi dan penelitian dilakukan terhadap manusia sebagai obyek dan subyek sekaligus.

Dapat dipahami bahwa dengan demikian relativitas kebenaran ilmiah tentang manusia mau tidak mau harus disertai oleh suatu rasa tanggung jawab mengenai manusia itu sendiri. Adalah jasa Max Weber yang menekankan bahwa: "...the ultimate aim of the science of social man was the enchancement of one's responsibility". Tanggung jawab ini pula yang akhirnya mendesak untuk memandang manusia sebagai obyek ataupun sebagai subyek, atau dengan perkataan lain menyatakan suatu kebenaran ilmiah (mengenai manusia) sebagai suatu relativitas.

Landasan berpijak ini adalah penting guna memahami uraian menurut bab-bab seperti diurutkan di bawah ini.

### 1. Lingkup pembahasan.

Manusia dan khususnya kepribadiannya ditempatkan pada suatu pusat perhatian uraian

selanjutnya. Oleh karena kepribadian yang dimaksud tidak dibatasi sebagai suatu keutuhan yang berdiri sendiri, melainkan memiliki makna tertentu atas latar belakang lingkungan sosialnya, maka jabaran masalah-masalah juga tidak terbatas pada ilmu psikologi saja.

Makna yang dimaksud ini selanjutnya hendak dilihat dari aspek tingkah-laku manusia, yaitu dalam lingkungan sosialnya. Dengan cara pembatasan ini, manusia dan khusus kepribadiannya juga akan ditinjau dari sudut tingkah-laku saja. Setiap unsur tingkah-laku manusia yang merupakan fakta tersebut akan meningkat menjadi fenomena.

Kepribadian manusia, dan terutama tingkah-laku yang berakar di dalam kepribadian, dapat diartikan sebagai serangkaian fenomena. Rangkaian fenomena tersebut akan memperoleh maknanya jikalau dilihat dan dipahami dalam konteks situasional yang memunculkan tingkah-laku itu. Tindakan yang sama dalam situasi yang berbeda akan menunjukkan makna yang berlainan pula. Di sinilah letak rasa tanggung jawab seorang penilai terhadap tingkah-laku orang lain.

Walaupun telah dikemukakan bahwa pembahasan masalah-masalah tidak dibatasi pada ilmu psikologi saja, namun karena suatu analisa ditentukan sebagai "tingkah-laku", maka "konteks" pembahasan akan tetap diwamai oleh psikologi. Psikologi merupakan sebuah disiplin ilmu di dalam sebuah rumpun ilmu-ilmu sosial, yang kebetulan bersifat "mikro" karena satuan analisisnya adalah tingkah-laku manusia.

### 2. Masalah-masalah yang dimunculkan

Untuk dapat bermuara ke masalah pokok seperti diungkapkan di dalam judul, maka masalah-masalah yang ditarik ke dalam ling-

karan perhatian akan bersifat bertahap tetapi saling berkait pula.

Dengan demikian akan diusahakan suatu konsistensi penjabaran masalah-masalah demi pemahaman kepribadian manusia dalam interelasinya dengan lingkungan sosial.

Masalah pertama bersangkutan dengan posisi individu di dalam masyarakat, bahkan sosial nasion. Tingkah-laku individu turut membentuk masyarakat, sebaliknya masyarakat mempengaruhi tingkah-laku individu.

Tampil dari penjelasan-penjelasan bahwa relasi antara individu dengan lingkungan sosialnya pada dasarnya merupakan bidang perhatian ilmu-ilmu Psikologi, Psikologi Sosial, Anthropologi, Sosiologi dan juga ilmu politik.

Masalah berikut hendak meninjau lingkungan hidup manusia, terutama menurut aspek sosial budaya. Dalam pada itu ternyata lingkungan sosial budaya spesifik Indonesia masih merupakan masalah yang belum memiliki pengertian pasti. Erat hubungan dengan masalah lingkungan sosial budaya ialah masalah selanjutnya, yakni masyarakat sebagai sistem sosial. Abstraksi masyarakat menjadi sistem sosial merupakan langkah konseptual, yang dalam hal ini diperlukan guna memungkinkan suatu analisa rasional. Maka perubahan-perubahan sosial budaya juga dapat dipahami sebagai proses yang berlangsung di dalam sistem sosial.

Setelah lingkungan sosial manusia dipahami menurut kenyataan-kenyataan empirikal spesifik Indonesia, dan kemudian diabstraksikan menjadi suatu sistem yang utuh, maka tampil masalah kepribadian manusia sendiri. Selain kepribadian sebagai suatu pengertian, dibahas pula pengaruh-pengaruh terhadap pembentukannya, dan kondisi kepribadian yang dianggap relevan guna menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial.

Urutan pembahasan masalah-masalah di atas tadi akhirnya menuangkan kembali masalah relasi antara individu dengan masyarakat, akan tetapi sekarang pada tingkat yang lebih abstrak dan menurut pandangan sistematis. Beberapa segi esensial muncul dengan sendirinya, misalnya yang berkenaan dengan identitas budaya dan identitas sosial manusia. Masalah identitas budaya Indonesia

dan identitas sosial manusia. Masalah identitas budaya Indonesia dan identitas sosial Indonesia dijadikan masalah dasar, dengan asumsi bahwa permasalahan itu timbul oleh adanya interaksi antara kepribadian manusia dengan sistem sosial di Indonesia dalam dimensi waktu.

## POSISI INDIVIDU DI DALAM MASYARAKAT

### 1. Beberapa pengertian dasar

Yang diartikan dengan Individu dalam hal ini adalah seorang manusia, yang tidak hanya memiliki peranan-peranan yang khas di dalam lingkungan sosialnya, melainkan juga mempunyai kepribadian serta pola tingkah-laku spesifik dirinya.

*Masyarakat* ialah sekelompok manusia dalam suatu kebersamaan hidup dan dengan wawasan hidup yang bersifat kolektif, yang menunjukkan keteraturan tingkah-laku warganya guna memenuhi kebutuhan dan kepentingan masing-masing.

*Persepsi* adalah pengamatan manusia terhadap sesuatu, yang langsung dikaitkan dengan makna tertentu.

### 2. Persepsi terhadap individu

Manusia dapat dikatakan sebagai suatu keutuhan ciptaan Tuhan yang mempunyai tiga aspek melekat pada dirinya, yaitu: aspek organik jasmaniah, aspek psikik-rohaniah dan aspek sosial kebersamaan. Ketiga aspek tersebut saling berkait, saling mempengaruhi dan kegoncangan pada salah satu aspek akan membawa akibat terhadap keseluruhan diri manusia itu.

Maka manusia menjadi individu apabila pola tingkah-lakunya adalah hampir identik dengan tingkah-laku massa yang bersangkutan. Proses yang meningkatkan ciri-ciri individualitas pada seorang sampai ia adalah dirinya sendiri, disebut sebagai proses individualisasi. Kadang-kadang juga diberi nama proses aktualisasi diri.

Selama perkembangan manusia menjadi individu, iapun mengalami bahwa dirinya dibebani berbagai peranan. Peranan-peranan ini terutama berasal dari kondisi kebersamaan hidup dengan sesama manusia. Dengan diadakannya berbagai peranan yang setiap kali

dibebankan kepada warga masyarakat masing-masing maka muncul apa yang dinamakan struktur masyarakat. Keutuhan sebuah masyarakat dapat diukur menurut keutuhan strukturnya, sedangkan kemantapan masyarakat itu tergantung dari kukuh tidaknya struktur yang dimaksud.

Tidak jarang dapat timbul konflik pada diri individu, karena pola tingkah-laku spesifik dirinya dapat bercorak bertentangan dengan peranan yang dituntut oleh masyarakat dari dirinya. Kalau individu tidak mau mengingkari dirinya sendiri dan tetap bertingkah-laku menurut pola pribadinya, maka ia pun disebut "menyimpang dari norma kolektif". Sebaliknya jikalau ia takluk dan menuruti kehendak kolektif dengan cara bertingkah-laku seperti diinginkan oleh lingkungan, maka disebut bahwa ia "kehilangan individualitasnya".

Dalam kenyataan hidup manusia, setiap warga masyarakat yang wajar menyesuaikan tingkah-lakunya menurut situasi aktual yang dihayatinya. Secara silih berganti ia memerankan diri sebagai individu dan sebagai warga bagian masyarakat. Keberhasilan seseorang untuk mencari titik optimum antara dua pola tingkah-laku tersebut dalam situasi-situasi yang senantiasa berubah, memberikannya konotasi "matang" atau "dewasa" dalam artian sosial.

Pengaruh lingkungan masyarakat terhadap individu, khususnya pembentukan individualitasnya, adalah sangat besar, namun sebaliknya individu pun berkemampuan untuk mempengaruhi masyarakat. Pengaruh individu yang sangat menonjol terhadap tata kehidupan masyarakat dapat membuatnya seorang tokoh, pahlawan, atau dipihak lain juga seorang pengacau. Yaitu apabila pengaruhnya berlangsung untuk kurun waktu yang relatif lama dan menjangkau sebagian atau sebagian besar masyarakat yang berkepentingan. Sebutan baik atau pun tidak baiknya pengaruh individu terhadap masyarakat, merupakan hal yang bersifat relatif. Relativitas ini ditentukan oleh relasi yang secara kolektif diharapkan berlangsung antara individu dengan masyarakat lingkungannya. Maka dari itu makna individu di alam sebuah sistem masyarakat komunis adalah berbeda dari makna individu di dalam sebuah sistem masyarakat liberal.

Begitu pula makna individu dalam suatu musyawarah adalah lain jika dibandingkan dengan makna individu di dalam sebuah rapat kerja.

### 3. Relasi individu dengan satuan mikro dan makro

Aspek organik, psikik dan sosial yang melekat pada individu, mengakibatkan bahwa kodratnya ialah untuk hidup bersama manusia lain. Kebersamaan hidup ini juga kecenderungan untuk hidup berkelompok, berbeda dari apa yang dapat diamati pada hewan. Kolektivitas kehidupan sekelompok hewan bersifat naluriah dan menuruti kaidah-kaidah ekologi, sehingga kebersamaannya dapat dinilai sebagai "mekanistik" kalau meminjam istilah itu dari *Durkheim*. Lain halnya dengan manusia, yang di samping unsur-unsur naluriah juga hidup dalam kebersamaan karena nalar. Disadari bahwa dengan cara membagi peranan di dalam kerangka kehidupan kolektif, perjuangan hidup menjadi lebih ringan. Juga disadari bahwa di samping kepentingan-kepentingan individual diperlukan suatu tata hidup yang mengamankan kepentingan-kepentingan komunal demi kesejahteraan bersama. Maka solidaritas yang dengan demikian ditumbuhkan merupakan solidaritas "organik" (*Durkheim*), yakni atas dasar saling membutuhkan, dan saling mengatur.

Perangkat tatanan kehidupan bersama menurut pola-pola tertentu kemudian berkembang menjadi apa yang kini disebut sebagai "pranata sosial" atau dalam abstraksi yang lebih tinggi dinamakan "kelembagaan" atau "institusi".

Kini dapat dimengerti, individu barulah individu apabila pola perilakunya yang khas dirinya itu diproyeksikan pada suatu lingkungan sosial yang disebut sebagai masyarakat. Justru kekhasannya itu atau pula penyimpangan tetap dari pola perilaku kolektif menjadikannya individu. Seorang manusia menjadi individu menurut relasinya dengan lingkungan sosialnya. Relasi tersebut bersifat majemuk serta simultan, sehingga dari individu dituntut kemampuan untuk membawa dirinya secara konsisten menurut kekhasan dirinya, tetapi juga relevan dengan relasi-relasi sesaat antar dirinya dengan berbagai per-

ubahan lingkungan sosial. Satuan-satuan lingkungan sosial yang melingkari individu dapat dibedakan antara:

- (a) keluarga
- (b) lembaga
- (c) komunitas
- (d) masyarakat
- (e) bangsa

Kalau individu memiliki "karakter", maka satuan-satuan lingkungan sosial tersebut di atas dikatakan mempunyai "karakteristik" yang setiap kali berbeda. Artinya: fungsi-fungsi struktur, peranan, dan proses-proses yang berlangsung di dalam dirinya menunjukkan sifat hakiki serta khas.

Dapat dibayangkan, bahwa relasi individu dengan setiap lingkungan sosial menurut jenis yang diurutkan tadi juga beraneka ragam. Posisi, peranan dan tingkah-lakunya diharapkan sesuai dengan tuntutan setiap satuan lingkungan sosial yang dimaksud dan di dalam situasi-situasi tertentu. Individu memerankan dirinya sebagai individu pada setiap kesempatan berinteraksi dengan lingkungan sosial tertentu, akan tetapi juga setiap kali menurut makna individualitas yang berlainan.

Kekhasan "karakter" individu yang berinteraksi dengan satuan lingkungan sosial menurut "karakteristik" tertentu memunculkan relasi-relasi yang kompleks. Relasi-relasi itu seringkali menjadi perhatian bermacam disiplin ilmu, runtut dengan luasnya cakupan masalah dan sesuai dengan wawasan ilmiah yang menjadi latar belakangnya.

Walaupun dijumpai keadaan tumpang tindih antara berbagai konsep yang berasal dari disiplin-disiplin ilmu yang berbeda, namun dalam garis besarnya diperoleh gambaran mengenai perhatian ilmiah khusus terhadap relasi-relasi antara individu dengan lingkungan sosialnya, seperti berikut ini:

### 1) *Relasi individu dengan dirinya*

Merupakan masalah khas psikologi, di mana istilah-istilah seperti citra-diri (self-image) dan citra ideal (ideal-image), tetapi juga Ego dan Superego, mewakili beberapa pandangan manusia terhadap dirinya. Bahkan muncul pula pengertian "depersonalisasi", apabila relasi individu dengan dirinya adalah seperti dengan orang yang asing saja.

### 2) *Relasi individu dengan keluarga*

Sejak awal konsistensinya, individu memiliki relasi-relasi mutlak dengan satuan sosial yang bernama keluarga. Ia dilahirkan dari keluarga, tumbuh dan berkembang, untuk kemudian membentuk keluarga. Tampil ke depan sebagai relasi-relasi yang amat menentukan karakter individu di kemudian hari: hubungan dengan ibu, ayah dan kakak beradik, atau pengganti figur-figur tersebut. Dengan orang tua dengan saudara-saudara sekandung terjalin relasi biologik, yang kemudian disusul oleh relasi psikologik dan sosial pada umumnya. Posisi dan peranan di dalam keluarga, yaitu sebagai anak orang tuanya dan sebagai kakak atau adik saudara-saudaranya, pada dasarnya merupakan resultante dari relasi biologik, psikologik dan sosial seperti diungkapkan tadi. Bahkan relasi-relasi khusus tersebut oleh kebudayaan lingkungan keluarga itu dinyatakan melalui bahasa, adat kebiasaan, maupun folklore yang berlaku.

Jelas bahwa relasi-relasi berikut interaksi sosial yang terdapat antara individu dengan keluarganya merupakan bidang perhatian psikologi Sosial. Namun sebagai pola relasi yang ada pada sejumlah keluarga sekaligus, masalahnya menjadi masalah kekerabatan seperti dijabarkan di dalam Anthropologi.

### 3) *Relasi individu dengan lembaga*

Kelembagaan sosial merupakan keutuhan tatanan perilaku manusia dalam kebersamaan hidup. Tumbuhnya individu ke dalam lembaga-lembaga sosial berlangsung melalui proses sosialisasi, sebab proses tersebut mengandung arti bahwa lembaga-lembaga masyarakat yang ada di dalam lingkungan individu makin disadari olehnya sebagai realitas-realitas obyektif. Bentuk ekstrim sebuah lembaga adalah sebuah organisasi yang eksistensinya memiliki dasar legitimasi dan juga legalitas. Disebut legitim, apabila lembaga yang dimaksud sudah merupakan realitas subyektif untuk sebagian masyarakat. Lembaga tersebut menjadi legal, jikalau eksistensinya diobyektifikasi melalui jalur hukum. Posisi dan peranan individu di dalam setiap kelembagaan sosial pada umumnya sudah dibakukan, yaitu berdasarkan moral, adat atau hukum yang

berlaku. Maka relasi-relasi yang ada antara individu dengan kelembagaan yang mencakupnya itu pun sudah ditentukan menurut pola yang pasti. Artinya, individualitasnya ditampung di dalam struktur hubungan yang ada pada kelembagaan tersebut. Tingkah-laku individu tetap spesifik dan berbeda dari tingkah-laku individu yang lain, justru karena posisi dan peranan di dalam struktur lingkungan sudah jelas.

Individu dapat disebut sebagai ketua, direktur, tetapi juga sebagai sesepuh, pemimpin atau tokoh pada umumnya. Kompleksitas interaksi sosial yang muncul sebagai akibat jalinan relasi-relasi individu dengan unsur-unsur lain di dalam keseluruhan struktur itu, juga menjadi masalah psikologi sosial. Struktur baku dan pola relasi yang ada pada lembaga-lembaga sejenis di pihak lain terungkap sebagai pranata sosial di dalam Anthropologi.

#### 4) *Relasi individu dengan komunitas.*

Di dalam ilmu sosiologi, komunitas diartikan sebagai satuan kebersamaan hidup sejumlah orang banyak, yang memiliki ciri-ciri (a) teritorialitas yang terbatas, (b) keorganisasian tata kehidupan bersama, dan (c) berlakunya nilai-nilai dan orientasi nilai yang kolektif (Poplin, 1960). Ketentuan batas-batas wilayah dapat bersifat obyektif maupun juga subyektif, sehingga batas-batas administratif dan batas-batas kultural jarang bertumpang tindih di dalam kehidupan sebuah komunitas. Komunitas mencakup individu-individu, keluarga-keluarga, dan juga lembaga-lembaga sosial yang saling berhubungan secara interdependen. Tampak bahwa struktur komunitas sudah jauh lebih rumit dan kompleks dari pada keluarga atau kelembagaan saja, namun demikian keseluruhan kompleksitas tersebut mengandung makna.

Makna kehidupan di dalam komunitas turut ditentukan oleh orientasi nilai yang berlaku bagi warganya, artinya oleh kebudayaan yang berlaku di dalam komunitas itu. Pada hakikatnya kebudayaan ini pula yang menumbuhkan pranata-pranata sosial, struktur kekerabatan keluarga dan juga perilaku individu maupun kolektif. Posisi dan peranan individu di dalam sebuah komunitas tidak lagi bersifat langsung, sebab tampak tingkah-lakunya tertampung

atau pun direndam oleh keluarga dan kelembagaan yang mencakup dirinya. Sebaliknya pula pengaruh komunitas terhadap individu tersalur melalui keluarganya melalui lembaga-lembaga yang ada. Mudah dipahami bahwa dengan demikian keluarga dan lembaga-lembaga di dalam sebuah komunitas juga dapat dipandang sebagai wahana-wahana sosialisasi atau penyebaran nilai-nilai budaya.

Komunitas dengan karakteristik yang khas pada umumnya menjadi bahan penelitian ilmu Anthropologi. Jikalau komunitas tersebut diabstraksikan menjadi "model" kehidupan bersama yang utuh, maka masuk pula unsur-unsur pembahasan dengan kerangka acuan sosiologi. Yakni apabila dengan "model" diartikan suatu sistem bayangan yang mewakili suatu sistem empirikal.

#### 5) *Relasi individu dengan masyarakat*

Masyarakat merupakan suatu lingkungan sosial yang bersifat makro, agak berbeda dari pengertian komunitas, aspek teritorialitas pada sebuah masyarakat kurang ditekankan. Namun aspek-aspek keteraturan sosial dan wawasan hidup kolektif memperoleh bobot yang lebih besar pula, sebab kedua aspek itu menunjuk pada derajat integrasi masyarakat, dan tingkat keorganisasiannya. Dalam konteks yang demikian luas dan komprehensif, masyarakat pada umumnya dipandang dari sudut Sosiologi. Fungsi struktur, proses dan variabel-variabel lain dipakai untuk mengkaji dan menjelaskan fenomena-fenomena kemasyarakatan menurut persepsi makro. Sifat makro itu diperolehnya dari kenyataan bahwa masyarakat pada hakikatnya terdiri dari sekian banyak komunitas, masing-masing dengan karakteristik yang mungkin saling berbeda. Sedangkan setiap komunitas itu juga sekaligus mencakup berbagai macam keluarga dan lembaga, jadi yang terdiri dari individu-individu. Maka relasi individu dengan masyarakat makro ini lebih bersifat sebagai abstraksi, lain dengan sebuah komunitas dan apalagi keluarga atau lembaga, di mana relasi-relasi antara individu dengan lingkungan sosial terbatas itu lebih konkrit sifatnya. Di dalam sebuah komunitas, seorang pencuri misalnya adalah seorang yang bernama A, dan berasal dari golongan X, khususnya keluarga Y. Di dalam masyarakat

makro, seorang pencuri merupakan pelaku yang menyimpang dari norma keteraturan sosial dan sekaligus dapat berperan sebagai indikator tinggi rendahnya keamanan lingkungan untuk wilayah pemukiman tertentu yang dihuni oleh golongan masyarakat dari stratum tertentu pula.

#### 6) Relasi individu dengan bangsa

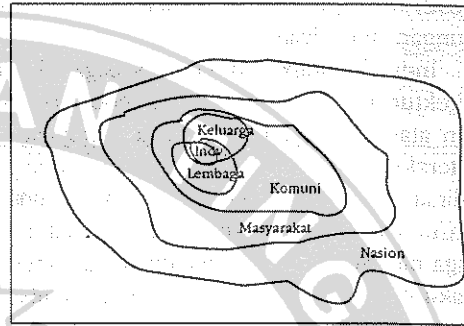
Dengan artian ilmu politik, sebuah bangsa ialah "an independent political unit" yang terdiri dari "a large territorial group with common citizenship rights and possessing characteristics differentiating it from other similar groups" (Smith). Kembali aspek teritorial menjadi sesuatu yang sangat penting, di samping keorganisasian wilayah serta masyarakat di wilayah tersebut. Wawasan hidup atas dasar nilai-nilai kolektif dengan demikian tidak begitu dilandasi oleh kebudayaan dalam arti kata sempit, melainkan wawasan kolektif tersebut mungkin lebih dekat dengan rumusan aspirasi bangsa seperti dicantumkan di dalam undang-undang dasarnya.

Sebuah nasion pada umumnya merupakan fakta yang diperkuat oleh legitimitas dan legalitas, jadi sama dengan sebuah lembaga. Memang dalam hal ini nasion dapat dipandang sebagai sebuah supra lembaga dengan karakteristik yang sama seperti lembaga mikro, walaupun juga lebih kompleks dalam wujudnya. Relasi individu dengan nasionnya dinyatakan pula dengan posisi serta peran-peranan yang ada pada dirinya, tetapi yang kesemuanya itu tertampung oleh atau tersalurkan melalui unit-unit lingkungan sosial yang lebih mikro. Hubungan langsung individu dengan nasion diekspresikan melalui posisinya sebagai warga negara.

Maka berbicara tentang nasion sebagai satuan politik yang bebas dan merdeka, analisa yang lebih mendetail mengenai karakteristiknya tidak dapat terlepas dari pandangan Sosiologi, bahkan Anthropologi dan Psikologi, yaitu khususnya apabila satuan analisa adalah tingkah-laku.

Dari uraian mengenai relasi individu dengan enam macam lingkungan sosial yang masing-masing mempunyai karakteristiknya sendiri dapat ditarik kesimpulan sementara,

bahwa kepribadian manusia dan terutama tingkah-laku yang berakar di dalam kepribadian itu memiliki makna individual yang langsung apabila konteks situasional adalah keluarga atau lembaga sosial. Makin besar lingkungan satuan lingkungan sosial, maka makin abstrak pula posisi dan peranannya.



Posisi Individu di dalam masyarakat.

## PENGERTIAN KEBUDAYAAN INDONESIA

### 1. Beberapa pengertian dasar

Pengertian mengenai kebudayaan dapat dirumuskan dengan berbagai cara, tergantung dari sudut pandang dan konsepsi yang dipergunakan. Dengan mengutip usaha pengelompokan definisi-definisi tentang kebudayaan seperti telah dilakukan oleh Bierstedt (1970:121-130), maka dihasilkan empat kelompok besar pengertian mengenai kebudayaan:

- a. Kebudayaan adalah hasil dari proses belajar, yaitu berupa jaringan alur yang menampung segala macam tingkah-laku masyarakat (learned ways of behavior).
- b. Kebudayaan adalah warisan tata kehidupan sosial dalam dimensi waktu, sehingga kualitas dari pada warisan tersebut berubah dari zaman ke zaman, karena terdapat aspek-aspek yang menghilang maupun yang ditambah (the social heritage).
- c. Kebudayaan adalah sesuatu yang "super-organic", artinya transenden dan bermakna, maupun memaknakan benda-benda serta tindakan-tindakan dalam kaitan sosialnya.

d. Kebudayaan adalah gaya hidup atau desain kehidupan, yang sedikit banyak mengandung unsur-unsur deskriptif dan menyertakan kualitas sikap, motivasi dan kemampuan masyarakatnya menurut karakteristik tertentu (design for living).

## 2. Kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia

Suatu usaha untuk menganalisa dan kemudian mendiskripsi "masyarakat Indonesia" secara menyeluruh dan utuh merupakan rencana yang amat ambisius dan juga tidak realistik. Belum lagi harus dipertanyakan, apakah dengan usaha semacam itu akan tercipta juga kedayagunaan bagi ilmu maupun aplikasinya. Terdapat beberapa faktor kondisional yang turut membentuk suatu masyarakat dan berperan dalam menumbuhkan ciri-ciri karakteristiknya. Faktor-faktor tersebut ialah geografi, biologi dan demografi, atau unsur-unsur alamiah di dalam lingkungan hidup manusia.

Kawasan Nusantara antara lain memperlihatkan deversitas dan variasi dalam kondisi geografi, sehingga dapat dipahami betapa berbeda pula corak serta sifat masyarakat yang terpencar di seluruh penjuru tanah air. Oleh karena ketiga faktor kondisional ini senantiasa berubah dengan kecepatan serta kualitas yang berbeda, dan di samping itu hanya secara terbatas dapat dikendalikan oleh manusia, maka dapat dikatakan bahwa perkembangan dan pembangunan masyarakat Indonesia di antara sekian banyak faktor pengaruh lain juga tergantung dari keadaan tata lingkungan fisik dalam kehidupannya.

Kemajemukan dalam kondisi lingkungan alamiah di Indonesia tampak seaneka-ragam dengan kemajemukan kondisi sosial budaya masyarakatnya. Kemajemukan ini menunjukkan corak multi dimensional, sebab tidak terbatas pada segi ethnik saja. Hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh cendekiawan asing dan pribumi menyimpulkan kondisi keanekaragaman ini dengan ungkapan-ungkapan seperti "Pluralistic society" (Furnivall, 1939) atau "Dualistic" (Boeke, 1942). Kemajemukan yang melintang secara horizontal tetapi juga melapis secara vertikal ini kadang-kadang juga dikonotasikan dengan "multiracial social

pyramid" (Dean, 1957) yang dilihat dari sudut pengelompokkannya merupakan "Cultural solidarity groups" (Soedjatmoko, 1967). Penekanan pada kontras-kontras, yang akhirnya di-konsepsikan menjadi dichotemo, pada waktu ini sedang "laku" di kalangan cendekiawan, sehingga muncul pembedaan "antara" "rural", "modern" dengan "tradisional", atau "fungsional" dengan "politik". Hingga sekarang belum dapat dijumpai suatu sikap ilmiah dari pihak cendekiawan Indonesia, apabila masalah yang hendak dibahas menyangkut kemajemukan ini.

Kaum politisi (jadi bukan ahli ilmu politik) selalu berbicara tentang persatuan dan kesatuan bangsa, akan tetapi apakah mereka juga dapat menunjukkan suatu konsepsi untuk mewujudkan keinginan itu menjadi suatu realitas dan bukan hanya khayalan belaka?

## 3. Konsepsi kesatuan dan pemersatuan bangsa.

Kiranya tidak akan ada seorang warganegara Indonesia yang dari lubuk hatinya tidak menginginkan kondisi kesatuan dan pemersatuan bangsanya. Seorang politikus akan mengembalikan masalahnya kembali pada dasar formalnya, yaitu pembukaan Undang-undang Dasar 1945, sedangkan seorang ahli strategi negara akan berbicara mengenai wawasan Nusantara yang seperti tercantum di dalam GBHN mencakup kesatuan Budaya, Ekonomi, Politik dan Hankam. Namun beberapa abad yang lalu *Immanuel Kant* sudah memberi peringatan bahwa suatu konsepsi yang tidak disertai persepsi (empirik) adalah kosong belaka, sedangkan persepsi (empirik) yang tidak didukung oleh konsep adalah buta. Maka jikalau masalah kesatuan dan pemersatuan bangsa mungkin sudah dirumuskan dengan konsepsi-konsepsi politik atau strategik, timbul pertanyaan sejauh mana konsepsi-konsepsi tersebut itu benar-benar sesuai dengan bukan saja realitas, melainkan dengan kenyataan hidup (living reality)? Pertanyaan tersebut mengimplikasikan diadakannya konsep-konsep perantara, yang oleh *Merton* (1949) diklasifikasikan sebagai "middle range theories". Konsep-konsep perantara ini yang seyogyanya menghubungkan-

kan konsep-konsep politikal dan strategik dengan kenyataan-kenyataan hidup! Kelangkaan akan konsep-konsep semacam itu mengakibatkan bahwa seperti kini banyak dilakukan, dipakainya konsep-konsep baku yang berasal dari dunia luar sebagai landasan penelitian di dalam lingkungan sosial budaya Indonesia. Langkah dan usaha demikian tidak akan menunjang dikembangkannya konsep-konsep dan teori-teori yang relevan dengan realitas sosial budaya Indonesia. Dapat sementara ditarik kesimpulan, bahwa sampai sekarang konsep-konsep kesatuan dan mempersatuan bangsa baru beranjak dari keinginan politik, namun belum didukung oleh konsep-konsep ilmiah yang mampu membantu realisasinya. Bahkan lebih jauh dari itu, sebuah konsepsi kesatuan budaya pun nampaknya belum tercipta hingga kini.

#### 4. Mencari kriteria "Kebudayaan Indonesia".

Istilah "Kebudayaan Indonesia" dan "Kebudayaan Nasional" seringkali dipakai orang sebagai sinonim untuk menunjukkan pada hal yang sama. Kejelasan, walaupun juga per definisi saja, belum ada tentang apa yang hendak diartikan dengan kebudayaan nasional. Bila sementara dikembalikan pada kelompok-kelompok definisi mengenai kebudayaan pada umumnya seperti telah dijelaskan di atas tadi (lihat hal 12), maka apa yang kita amati dan hayati di sekeliling kita sehari-hari belum pula dapat disebut sebagai "learned ways of behavior", apalagi sebagai "the social heritage" sesuai dengan referensi Pancasila, ataupun "the superorganic" yang transenden dan bermakna. Mungkin saling aman dapat didekati dengan konsepsi "design for living", namun tentu dengan catatan bahwa apa yang dapat disebut dengan "kebudayaan" di Indonesia sekarang ini baru merupakan usaha dan ikhtiar manusia Indonesia untuk mencari dan menemukan bentuk tetap dari "design for living" itu. Bahwa hal tersebut belum pula diperoleh, tercermin di dalam konsepsi-konsepsi dichotomik yang tadi sudah dijabarkan.

Di bidang kebudayaan terdapat kecenderungan untuk "melestarikan nilai-nilai luhur bangsa", yang juga sering diimplementasikan dengan mengeluarkan kebijaksanaan tentang

"permuseuman", pemugaran benda-benda bernilai sejarah", bahkan sampai ke ekspeloras arkeologik. Sikap konservatif itu memang perlu, akan tetapi juga harus diimbangi dengan pandangan progresif ke depan, hal yang terakhir ini belum nampak. Bahkan acapkali pula teknologi (yang sebenarnya merupakan produk budaya pula) dilihat sebagai "perusak nilai-nilai tradisional" atau sebagai "pencemaran nilai-nilai asli bangsa". Tidak jelas, melalui jalur mana "social heritage" yang hendak diamankan ini hendak dikaitkan dengan pembangunan nasional, yang substansinya adalah serba perubahan.

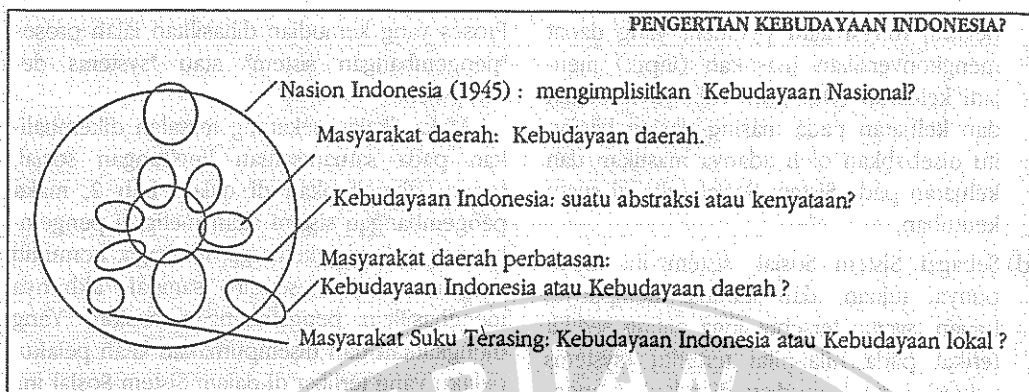
Ciri "nasional" yang ada pada istilah "Kebudayaan Nasional" tentu akan membawa pembatasan temporal, sebab Republik Indonesia sebagai nasion baru muncul pada 17 Agustus 1945. Artinya "kita baru bisa bicara mulai saat kemerdekaan" (*Haryati Soebadio*, 1980).

Di pihak lain dapat penulis sendiri kemukakan, bahwa antisipasi adanya suatu kebudayaan nasional sudah tercermin di dalam perkembangan sikap politik sejak tahun 20-an, yang akhirnya secara ganzheitlich dirumuskan dalam Sumpah Pemuda tahun 1928.

Bagian yang menyatakan adanya "satu Bahasa, yaitu Bahasa Indonesia" pada dasarnya dapat dipandang sebagai landasan strategik bagi suatu "Kebudayaan Nasional" yang selanjutnya hendak dibangun. Pendekatan yang lebih sintetis dilakukan oleh *Harsja W. Bachtiar* (1980) dalam memandang sebuah nasion sebagai suatu supresistem yang mencakup tiga sistem yang saling terkait, yaitu sistem budaya, sistem sosial dan sistem kepribadian (lihat juga *Kluckhohn*). Menurut pendapat ini pembinaan kesatuan nasion Indonesia perlu diarahkan pada sekurang-kurangnya tiga usaha yang berbeda, yaitu (1) usaha untuk membina perkembangan sistem budaya nasion Indonesia, atau membina perkembangan dan persebaran kebudayaan nasional Indonesia, (2) usaha untuk memperbanyak dan memperkuat kolektiva-kolektiva ke Indonesia-an, serta (3) usaha untuk membina perkembangan unsur-unsur ke Indonesia-an dari kepribadian orang-orang yang bersama-sama merupakan perwujudan nasion



## PENGERTIAN KEBUDAYAAN INDONESIA?



kita. Jadi dapat penulis ini simpulkan bahwa mulai terarah tetapi belum secara eksplisit sudah tampak adanya ikhtiar untuk melihat perkembangan kebudayaan nasional sebagai suatu proses pertumbuhan dari kondisi kemajemukan sosial budaya ke arah kemanunggalan yang dilingkupkan (superimposed) pada kemajuan itu, melalui proses solidaritas sosial serta proses persamaan persepsi dan cathexis individu-individu.

Dari gagasan-gagasan "bebas nilai" (value-free) yang kebanyakan berasal dari cendekiawan itu hendaknya kemudian disusun kriteria untuk apa yang nanti secara konseptual maupun empirikal dapat dipahami dan dihayati sebagai "Kebudayaan Indonesia". Namun nampaknya jalan yang masih harus ditempuh cukup jauh.

### MASYARAKAT SEBAGAI SISTEM SOSIAL

#### 1. Beberapa pengertian dasar

Yang dinamakan sistem ialah secara singkat "a set of interrelated elements" atau dengan bahasa methodologik "a set of interdependent variables". Dengan demikian keseluruhan sistem selalu mempunyai makna lain dari pada sebagai penjumlahan makna bagian-bagiannya saja.

Sistem sosial adalah sekelompok manusia, akan tetapi lebih sering diartikan sebagai masyarakat, yang diabstraksikan dari kenyataan-kenyataan fenomenologik, dan yang terdiri dari "a set of interdependent (sosial) variable".

General System Theory (GST) adalah teori mengenai kesisteman atau cara berpikir menurut kaidah-kaidah sistem.

System Approach atau pendekatan sistem

ialah tidak lain cara pendekatan dan cara persepsi terhadap sesuatu, berdasarkan kaidah-kaidah sistem.

#### 2. Sistem sosial dan pembangunan

Meskipun teori mengenai kesisteman berasal dari ilmu Biologi (*Bertalanffy*, 1968) namun cara berpikir yang tampil menurut wawasan ini kemudian ternyata dapat dialihkan pula ke bidang-bidang lain.

Tata pikir menurut teori sistem itu dinamakannya "a novel paradigm in scientific thinking", sebab dengan berpikir menurut tatanan tertentu ini masalah-masalah yang dibahas akan muncul secara komprehensif dengan bagian-bagiannya saling terkait.

*Boulding* (1956) telah menyusun sembilan tingkat abstraksi yang masing-masing mewakili sebuah sistem, dan Sistem Sosial dalam rangka ini terletak pada urutan hirarki sistem ke delapan.

Telah banyak usaha dilakukan untuk menggambarkan masyarakat sebagai Sistem Sosial, seperti terbaca di dalam karya-karya *Pareto*, *Parsons*, *Loomis*, dan lain-lain lagi. Pemikiran dasar pada semua konsepsi yang juga saling berbeda itu ialah bahwa:

- (a) Sistem Sosial terdiri dari bagian-bagian yang utuh tetapi saling berkaitan secara bermakna. Jadi sistem itu mempunyai struktur.
- (b) Setiap bagian dari Sistem Sosial mempunyai fungsinya tersendiri, tetapi tetap dalam rangka keseluruhan sistem. Yaitu tidak lain karena keseluruhan Sistem Sosial itu juga mempunyai fungsi yang pasti.
- (c) Tergantung dari konsepsi yang dipakai, maka bagian-bagian sistem dapat berwujud

pelaku, fungsi atau peranan, yang dapat mengkonversikan masukan (input) menjadi keluaran (Output). Adanya masukan dan keluaran pada masing-masing bagian itu disebabkan oleh adanya masukan dan keluaran pada Sistem Sosial sebagai suatu keutuhan.

- (d) Sebagai Sistem Sosial, sistem ini mempunyai tujuan, dan karena mempunyai tujuan, sistem tersebut juga paling sedikit terikat pada nilai-nilai tertentu (systems values) yang kemudian diendapkan menjadi tolok ukur tolok ukur (system parameters).
- (e) Sistem Sosial tidak kaku (antara lain karena memiliki sifat sebagai "sistem terbuka"), sehingga senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungannya dari saat yang satu ke saat lain. Perubahan-perubahan sistem yang ditimbulkan mempunyai corak evolusioner.
- (f) Perubahan revolusioner akan membuat punah sistem yang lama, karena diganti oleh sistem yang lain. Sebagai contoh: revolusi industri adalah sebuah perubahan yang cepat dan mendalam, yang merangsang munculnya sistem masyarakat baru di abad lampau.

Dapat dibayangkan bahwa masyarakat merupakan sebuah sistem sosial, apabila bagian-bagiannya diabstraksikan menurut pelaku-pelaku, fungsi-fungsi atau peranan-peranan yang nyata ada. Juga akan masuk akal bahwa perubahan di dalam masyarakat itu identik dengan perubahan sistem. Oleh karena setiap pembangunan, seperti, Pembangunan Nasional, mempunyai ciri hakiki yang bersifat pertumbuhan dan pengembangan, maka perubahan-perubahan yang berlangsung itu juga harus direncanakan dengan cermat.

Dalam bahasa sistem, GBHN menjadi semacam kebijaksanaan pengendalian sistem guna mencapai tujuan-tujuan yang dikehendaki (Tujuan Nasional), sedangkan Repeleta adalah serangkaian usaha guna mencapai sasaran-sasaran bertahap dalam rangka mencapai tujuan tadi.

Di dalam Pembangunan Nasional, Sistem Sosial Indonesia menjadi subyek dan obyek pembangunan itu sendiri.

Proses yang kemudian dihasilkan ialah proses "pengembangan sistem" atau "systems development".

Maka jikalau sekarang masalah dikembalikan pada satuan-satuan lingkungan sosial, seperti diungkapkan di dalam bab 2, maka pengembangan sistem akan meliputi pengembangan individu, keluarga, lembaga, komuniti dan masyarakat sendiri sampai akhirnya menghasilkan pengembangan nasion. Yang ditingkatkan dan disempurnakan ialah pelaku-pelaku yang terlibat di dalam Sistem Sosial ini, fungsi-fungsi serta peranan-peranannya, tetapi juga proses-proses masukan dan keluaran.

Selain peningkatan kadang-kadang juga diperlukan adanya perubahan, yaitu di dalam macam fungsi maupun di dalam struktur yang menampung fungsi-fungsi baru. Namun suatu perubahan struktural selalu bersifat mendasar, sebab struktur yang berubah begitu banyak dengan sendirinya memunculkan sistem yang baru pula. Maka pada umumnya perubahan-perubahan pada sistem sendiri cenderung dikendalikan dan dibatasi sampai ke titik optimum tertentu, yakni yang dinamakan "homeostasis" atau keseimbangan sistem.

Kondisi yang melebihi titik keseimbangan ini dianggap "berbahaya" untuk kelestarian sistem yang ada. Pembangunan Nasional pada kurun-kurun waktu tertentu perlu juga melampui titik keseimbangan tadi, artinya memerlukan diselenggarakannya perubahan struktural. Hal ini biasanya menjadi isu politik.

### 3. Gambaran sebuah alternatif

Kiranya mudah dimengerti bahwa gambaran sebuah masyarakat yang kemudian diabstraksikan menjadi sebuah sistem sosial itu bukan hal yang mutlak. Kesenjangan dengan sistem-sistem sejenis ditimbulkan apabila sejak awal memang sudah bertalian konsepsi tentang apa yang dimaksud dengan masyarakat tadi.

Dengan bersandar pada *Parsons* (1951) dan *Loomis* (1960), tetapi dengan juga memanfaatkan konsep-konsep Psikologi Sosial untuk menjabarkan dinamika sosial, maka dapat disusun sebuah alternatif bentuk Sistem Sosial. Pada kesempatan ini hal tersebut dilakukan sebagai ilustrasi saja, sehingga kemandapan hasil penggambaran itu tentu masih

tergantung dari kelalaian modelnya setelah diuji secara empirikal.

Suatu masyarakat menunjukkan tata kehidupan, yang untuk sebagian terarah pada usaha-usaha dan cara-cara untuk melestarikan kehadirannya, di samping dilakukannya berbagai ikhtiar dalam rangka penyesuaian diri dengan perubahan-perubahan lingkungan (yang ada di luar masyarakat tersebut) serta pengembangan dirinya. Kelompok usaha pertama disebut dengan "sistem pemeliharaan kelestarian sosial", jadi tujuannya adalah untuk memelihara fungsi-fungsi sosial berikutnya yang:

- (a) menjaga batas-batas yang sudah ditetapkan, misalnya antar hak dan wewenang, antara individu dengan individu lain, antara kelompok atau lembaga dengan individu, dan seterusnya.
- (b) mengelola konflik-konflik struktural dan konflik-konflik kepentingan yang terjadi.
- (c) mengintegrasikan warga masyarakat, yaitu melalui komunikasi dan cara-cara pernyataan diri lain.

Kelompok usaha yang kedua, yang menunjang masyarakat untuk menyesuaikan dirinya dengan perubahan-perubahan lingkungan atau untuk mengembangkan diri, dapat diberi nama "sistem usaha dan pengembangan" (effective system). Sistem ini juga yang membantu masyarakat dalam gerak perubahan diri, misalnya untuk menuju sasaran-sasaran dicapainya.

Fungsi-fungsi yang bersangkutan adalah:

- (a) adaptasi terhadap lingkungan, dengan memanfaatkan segala sumber daya dan fasilitas yang ada.
- (b) pemetaan dan penyelenggaraan proses pengambilan keputusan, yang pada dasarnya ialah akibat dari terselenggaranya "distribusi wewenang atau kekuasaan" menurut pola tertentu.

Selain dua sistem yang sudah disebut, yaitu yang menurut hakekatnya merupakan subsistem dari Sistem Sosial yang mencakupnya, masih ada dua subsistem lagi yang masing-masing bereferensi pada tujuan masyarakat dan pada sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat itu. Dengan perkataan lain,

kedua subsistem ini bersama harus menghasilkan dan mengelola energi total yang diperlukan oleh masyarakat yang bersangkutan. Kedua sub sistem yang dimaksud ialah "sistem kekuasaan sosial" dan sistem prasarana konversi sumber daya".

Sebenarnya "sistem kekuasaan sosial" dapat pula dilihat sebagai unsur pengendali sistem secara keseluruhan, ibarat sebuah organisme yang senantiasa memperlihatkan adanya sebuah pusat pengendalian. Kaitan pusat ini dengan "sistem pemeliharaan kelestarian sosial" ialah dalam rangka menyelenggarakan proses-proses keteraturan dan kehendak sosial. Maka tolok ukur yang dipakai untuk mengatur proses-proses itu ialah nilai-nilai kolektif yang ada pada masyarakat, tetapi juga tujuan-tujuan masyarakat itu sendiri.

Hubungan yang tampak dengan "sistem usaha dan pengembangan" ialah untuk menyelenggarakan proses-proses pencapaian tujuan yang dikemukakan tadi. Dalam praktek, proses ini berupa proses pengambilan keputusan oleh masyarakat melalui "sistem kekuasaan sosial" yang dimaksud. "Sistem kekuasaan sosial" ini juga berfungsi untuk mengelola energi bagi keseluruhan sistem, hal mana mungkin karena terdapatnya "sistem prasarana konversi sumber daya".

"Sistem prasarana konversi sumber daya" merupakan bagian dari Sistem Sosial, yang mempunyai fungsi untuk merubah sumber daya yang dimiliki masyarakat menjadi energi untuk keseluruhan sistemnya. Sumber daya ini berupa kondisi-kondisi geografi, demografi dan yang bersifat alamiah. Sistem prasarana konversi tersebut ini pada umumnya juga dikenal dengan nama "ilmu pengetahuan dan teknologi".

"Kondisi ilmu pengetahuan dan teknologi". Kondisi ilmu pengetahuan dan teknologi pada masyarakat yang bersangkutan berhubungan erat dengan "sistem pemeliharaan kelestarian sosial", yakni melalui proses pembentukan kemampuan manusia-manusianya dengan kelembagaan. Di pihak lain "sistem prasarana konversi sumber daya" ini mendukung sistem berikut, yang tadi sudah diberi nama "sistem usaha dan pengembangan". Proses antara kedua sistem itu adalah proses adaptasi yang

memungkinkan Sistem Sosial menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, tetapi juga untuk pengembangan diri lebih lanjut. Dengan perkataan lain, hasil akhir Sistem Sosial pada dasarnya ialah keluaran dari sub sistem usaha dan pengembangan, dan menurut hakekatnya mempunyai makna "survival & development" bagi sistem sosial yang berkepentingan.

Maka jikalau dikatakan bahwa masyarakat sedang mengalami "perubahan sosial budaya", perubahan-perubahan itu akan tercermin di dalam struktur yang terjalin pada setiap sub-sistem yang tadi dibicarakan. Struktur yang berubah secara evolusioner ini dapat disebabkan oleh:

- (a) penggeseran nilai-nilai kolektif, misalnya karena pengaruh nilai-nilai "asing",
- (b) perubahan dalam tujuan masyarakat, yang pada dasarnya jarang sekali terjadi,
- (c) perubahan dalam kondisi sumber daya yang tersedia dalam dimensi waktu.

Visualisasi dari kerangka berfikir yang melandasi model sebuah Sistem Sosial ini sebagai satu alternatif, terpapar di bawah ini.

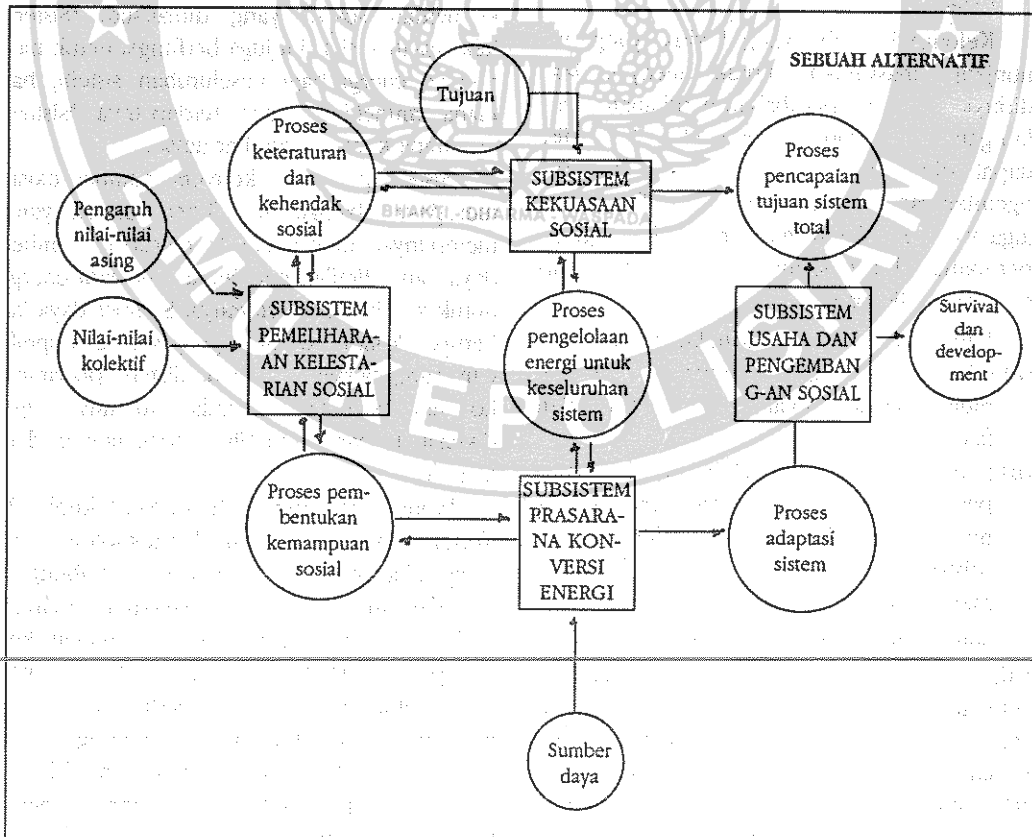
## KEPRIBADIAN DAN REFERENSI-REFERENSI PRIBADI

### 1. Beberapa pengertian dasar

Dalam rangka ulasan sejauh ini, *kepribadian* dapat diartikan sebagai suatu keteraturan disposisi-disposisi individual yang mempunyai relevansi sosial, sehingga juga mempunyai makna sebagai pola penyesuaian diri oleh individu. Istilah karakter hampir sinonim dengan pengertian kepribadian, tetapi lebih menekankan unsur-unsur khas yang ada pada individu tertentu. Dengan referensi pribadi dimaksud semua stimulasi dari luar maupun dalam dirinya, yang secara terpolata mempengaruhi tingkah-laku individu.

### 2. Kepribadian menurut makna sosial

Di dalam Ilmu Psikologi dapat dijumpai bermacam definisi mengenai kepribadian, setiap kali dilatarbelakangi oleh konsepsi-konsepsi yang saling berbeda. Maka terdapat definisi-definisi yang hendak melihat kepribadian sebagai suatu keutuhan yang otonom dan berdiri sendiri. Definisi-definisi lain mencoba menilai kepribadian sebagai suatu



keutuhan, tetapi dalam hubungan interdependen dengan lingkungannya. Bahkan ada pula aliran-aliran teori yang lebih beranggapan bahwa kepribadian itu tidak lain merupakan produk bentukkan oleh lingkungan saja.

Apabila dipersoalkan relasi antara kepribadian dan lingkungan atau sistem sosial, maka adalah lebih relevan jikalau kepribadian dilihat sebagai keutuhan individu dalam interdependensi dengan lingkungan hidupnya. Hal ini kiranya konsisten dengan judul dan materi pembahasan sejauh ini. Dengan perkataan lain, kepribadian diberi arti menurut makna sosialnya.

Interdependensi antara kepribadian dengan lingkungan hidupnya membawa akibat, bahwa selama perkembangan individu dapat diasumsikan adanya pola-pola pengaruh yang setiap kali turut membentuk tingkah-lakunya, bahkan turut membentuk pola-pola tingkah-laku yang menetap. Dikatakan bahwa individu pada akhirnya memiliki disposisi-disposisi individual yang mempunyai relevansi sosial.

Disposisi-disposisi individual dengan relevansi sosial itu hanya akan tampak secara konkrit melalui tingkah-laku individunya. Manusia dinilai baik atau buruk, suci atau jahat, bermoral atau tidak bermoral, dengan cara menilai tingkah-lakunya tadi. Apa yang menjadi isi hatinya tidak terkena penilaian, sejauh hal itu tidak diekspresikan ke luar.

Namun disposisi-disposisi yang ada pada individu juga tinggal terpendam saja, apabila tidak diterjemahkan menjadi tingkah-laku. Tingkah-laku yang diberi arah oleh disposisi itu baru muncul apabila dirangsang oleh 'stimulus', baik dari luar maupun dari dalam diri individu. Seorang yang haus akan mencari minuman, sebaliknya minuman yang dihidangkan dengan menarik akan mengundang seorang untuk meminum. Dalam aspek relasi timbal-balik ini terletak makna sosial pada tingkah-laku manusia di dalam lingkungannya.

Jikalau dilihat dari sudut tingkah-lakunya, maka disposisi-disposisi individual akan memiliki arti sebagai referensi-referensi pribadi bagi individu. Referensi-referensi pribadi ini tumbuh, berkembang atau berubah dalam dimensi waktu, sesuai dengan alur perubahan lingkungan selama hidup seorang. Sehingga

dapat pula disimpulkan, bahwa bentukan-bentukan disposisional dari waktu yang lampau boleh jadi berbenturan dengan relevansi tingkah-laku sesuai tuntutan lingkungan aktual. Kesenjangan sikap dan tingkah-laku antar generasi merupakan salah satu contohnya.

Dengan demikian dapat dinalar lebih lanjut, bahwa tingkah-laku seorang itu menyimpang, apabila dilihat terjadinya perbedaan antara tingkah-laku nyata tersebut dengan norma atau harapan lingkungan sosial sesaat. Apabila kebetulan pola perilaku manusia yang bersangkutan masih sesuai dengan tuntutan serta harapan seperti dijumpai pada masa lampau, dan walaupun juga menyimpang dari norma sesaat, maka manusia itu dijuluki "kolot" atau "konservatif". Sebaliknya seorang mungkin menyebut dirinya "modern" atau "progresif", apabila ia berusaha menyesuaikan tingkah-lakunya dengan apa yang ia bayangkan sebagai norma-norma mendatang. Oleh manusia waktu sekarang bisa terjadi ia dianggap sebagai "eksentrik".

Muncul masalah, sejauh mana referensi-referensi pribadi berlaku dalam dimensi waktu mengingat akan pengaruh dalam dimensi waktu akan pengaruh yang terus-menerus di alami oleh individu. Secara singkat dapat diungkapkan sesuai pengaruh-pengaruh itu sebagai berikut:

- a) *Masa lampau* pada hakekatnya mendapatkan pengalaman-pengalaman tentang kondisi lingkungan hidup di dalam diri individu. Sebagian dari kondisi-kondisi itu terutama yang bersifat normatif, tertanam ke dalam dirinya melalui proses internalisasi. Ini pula yang terjadi dengan nilai-nilai sosial dan budaya, yang disebar dan dilanjutkan ke generasi berikutnya dengan hasil yang dinamakan produk *sosialisasi*. Internalisasi produk-produk sosialisasi itu akhirnya membentuk sebagian dari referensi-referensi pribadi, yang bersifat sebagai *pembatasan*.
- b) *Masa mendatang* terkait dengan individu atau kepribadiannya dalam bentuk antisipasi-antisipasi, khususnya yang berlainan dengan apa yang ada sekarang. Maka pada umumnya ia munculkan juga sekaligus

inovasi-inovasi, yang ia bayangkan merupakan hal-hal yang lebih relevan dengan kondisi di waktu yang akan datang. Dikatakan bahwa individu itu memproyeksikan *harapan-harapannya* ke dalam situasi aktual, artinya, ia jadikan referensi pribadi yang turut menentukan tingkah-lakunya.

- c) *Masa sekarang* menghadapi seorang dengan realitas-realitas aktual serta faktual hasil persepsi oleh individu, yang merubah fakta menjadi fenomena baginya, pada dasarnya sudah dipengaruhi pula oleh referensi-referensi pribadi, yaitu sebagai pembatasan maupun, harapan ditambah dengan referensi pribadi sesaat yaitu kebutuhan-kebutuhan aktual. Dapat dipahami bahwa tingkah-laku yang akhirnya diperankan itu pada hakekatnya dapat dianggap sebagai resultante semua stimuli luar dengan referensi-referensi pribadi yang ada pada dirinya.

Jadi konsistensi tingkah-laku manusia individu dengan tuntutan lingkungan sosial seharusnya ditinjau lebih mendalam, sebelum melakukan penilaian (judgement) terhadap dirinya. Yang harus ditelusuri pula ialah, apakah lingkungan sosial itu sendiri tumbuh dan berkembang secara konsisten menurut jalur masa lampau, masa sekarang dan masa mendatang?

### 3. Hubungan kepribadian dengan perubahan sosial budaya

Perubahan evolusioner dalam orientasi nilai pada warga masyarakat dapat mengakibatkan bahwa baik tujuan-tujuannya maupun juga sumber daya yang ada memperoleh posisi yang berbeda dalam rangka kepentingan-kepentingan bersama. Yaitu berbeda dari posisi semula. Akibat lanjutan ialah juga kemungkinan dibutuhkannya suatu aransemen baru dari pada fungsi-fungsi yang sudah ada, apalagi jika ditambah dengan fungsi-fungsi baru. Terjadilah apa yang disebut dengan perubahan struktural.

Suatu perubahan sosial-budaya yang berlangsung pada masyarakat mustahil terlepas dari perubahan-perubahan struktural dalam tubuhnya, karena apabila struktur lama

dengan gigih dipertahankan, maka akan timbul konflik-konflik struktural atau sebaliknya perubahan sosial-budaya yang sedang berproses itu hanya merupakan gerak semu.

Perubahan kondisi sosial-budaya yang berlangsung terlalu cepat, walaupun tidak revolusioner, akan mengakibatkan bahwa tumbuh kesenjangan-kesenjangan besar antara kondisi lingkungan di masa lampau, masa sekarang dan masa mendatang. Namun perlu diingat fenomena bahwa perubahan sosial struktural pada umumnya berjalan lebih pesat dari pada perubahan dalam orientasi budaya. Dengan ungkapan psikologik dikatakan, bahwa proses sosialisasi akan menghasilkan sikap dan tingkah-laku, yang hanya dengan usaha sistematis dan terarah dapat diubah melalui proses-proses de-sosialisasi dan proses re-sosialisasi. Ini pun berlangsung tidak sempurna, pula penuh konflik pribadi dan konflik sosial.

Perubahan dalam kondisi sosial-budaya suatu masyarakat bukan juga merupakan proses yang berdiri sendiri, karena bagaimanapun juga pelaku-pelaku utama di dalam proses tersebut adalah manusia. Jadi manusia individu-individu atau manusia berkelompok, yang tingkah-lakunya berakar di dalam kepribadian hasil bentukan dalam dimensi waktu. Dengan perkataan lain, perubahan sosial-budaya di dalam masyarakat berawal dari dan berakhir pada manusia warga masyarakat itu sendiri.

Tentu suatu kebijaksanaan konservatif di bidang kultural akan berusaha mengawetkan masyarakat tersebut menurut nilai-nilai kolektifnya. Jikalau diperlukan juga perubahan sosial struktural dalam tubuhnya, maka pada dasarnya struktur baru tersebut akan tetap diberi makna sesuai nilai-nilai konservatif itu pula. Seorang direktur adalah tetap "bapak" dan bukan atasan manajerial, seorang atasan yang lebih tua pun selalu "pasti benar" dalam kebijaksanaannya. Begitu juga kelembagaan birokrasi, yang menurut hakekatnya seharusnya bersifat "impersonal", akhirnya menjadi suatu struktur kekuasaan yang dilekatkan pada kelompok-kelompok elite tertentu menurut garis turun-temurun (ascriptive). Banyak lagi fenomena-fenomena aktual kini dapat dipersepsi

menurut dalil-sebab-akibat ini, yang tidak selalu dapat dinilai menguntungkan bagi Pembangunan nasional.

Kepribadian manusia adalah sebuah sistem terbuka (open-system), sehingga tidak sepenuhnya dapat dikendalikan dari dalam maupun dari luar. Betapapun konservatif lingkungan sosial bagi seorang, namun ia sendiri tetap akan "menyimpang" dari imperatif-imperatif kultural yang telah disosialisasikan terhadapnya, karena ia pun hidup di dalam masyarakat yang juga merupakan sistem terbuka sendiri. Maka apakah kebijaksanaan "pengawetan nilai-nilai budaya lama" itu tidak sebaiknya diganti dengan kebijaksanaan "pengembangan nilai-nilai budaya", dengan beranjak dari nilai-nilai seperti adanya saja?

Jadi beralih dari suatu "past-orientation" ke suatu "future-orientation", sesuai dengan makna Pembangunan Nasional?

## IDENTITAS BUDAYA DAN IDENTITAS SOSIAL

### 1. Beberapa pengertian dasar

Maksud *identitas* ialah suatu keadaan, yang dengan nyata dan tepat menyerupai deskripsi tertentu mengenai seorang.

*Identitas budaya* adalah suatu keadaan nyata, yang sesuai dengan deskripsi mengenai kebudayaan yang bersangkutan, pada seorang atau masyarakat.

*Identitas sosial* adalah sesuatu keadaan nyata pada seorang yang menyangkut fungsi posisi dan peranannya sesuai dengan deskripsi kondisi sosial yang berlaku di dalam lingkungannya.

### 2. Identitas sosial budaya ?

Dengan tidak berpikir terlalu panjang orang banyak suka berbicara mengenai "identitas" sosial-budaya jika hendak mengungkapkan ciri-ciri kekhasan suatu masyarakat. Langkah dengan demikian adalah mungkin, apabila yang dibicarakan ialah suatu masyarakat yang homogen di mana karakteristik budaya dan karakteristik sosial itu saling mengisi dan saling menunjang. Hal tersebut mulai menjadi masalah lebih sukar, jikalau masyarakat sebagai obyek pembahasan itu ternyata bersifat heterogen, apalagi majemuk seperti di kawasan Nusantara ini.

Sinkronitas antara segi-segi budaya dengan segi-segi sosial merupakan suatu idaman yang lebih bercorak ideal dari pada empirikal. Peningkaran dari kenyataan itu akan menghasilkan suatu wawasan tentang masyarakat Indonesia; irreal, spekulatif dan secara konseptual bersifat "kosong". Sebaliknya adalah persepsi terhadap masyarakat yang hanya melandaskan diri pada empiri faktual, yang akhirnya melihat masyarakat Indonesia sebagai suatu "molting pot" dengan hanya sedikit tanda-tanda akan kemungkinan terbentuknya suatu keutuhan. Persepsi demikian itu adalah "buta", sebab tidak didukung oleh konsepsi-konsepsi yang relevan dengan kenyataan politikal tentang kesatuan bangsa dan negara.

Jika dipandang dari sudut teoretikal dan akademik, perbedaan antara aspek kebudayaan dengan aspek kemasyarakatan adalah lebih jelas, sebab masing-masing aspek diasumsikan mengandung variabel-variabel yang berbeda.

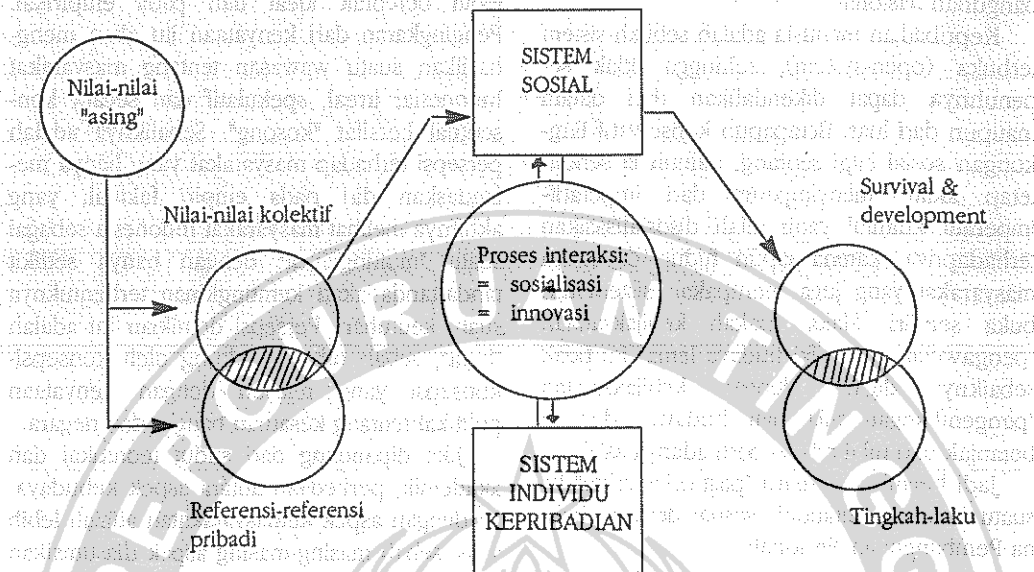
Dengan mengikuti *Bierstedt* (1970), maka kebudayaan mencakup tiga komponen atau variabel, yaitu:

- (1) keyakinan-keyakinan (beliefs)
- (2) nilai dan norma-norma (values and norms)
- (3) bentukan materi (formed matter).

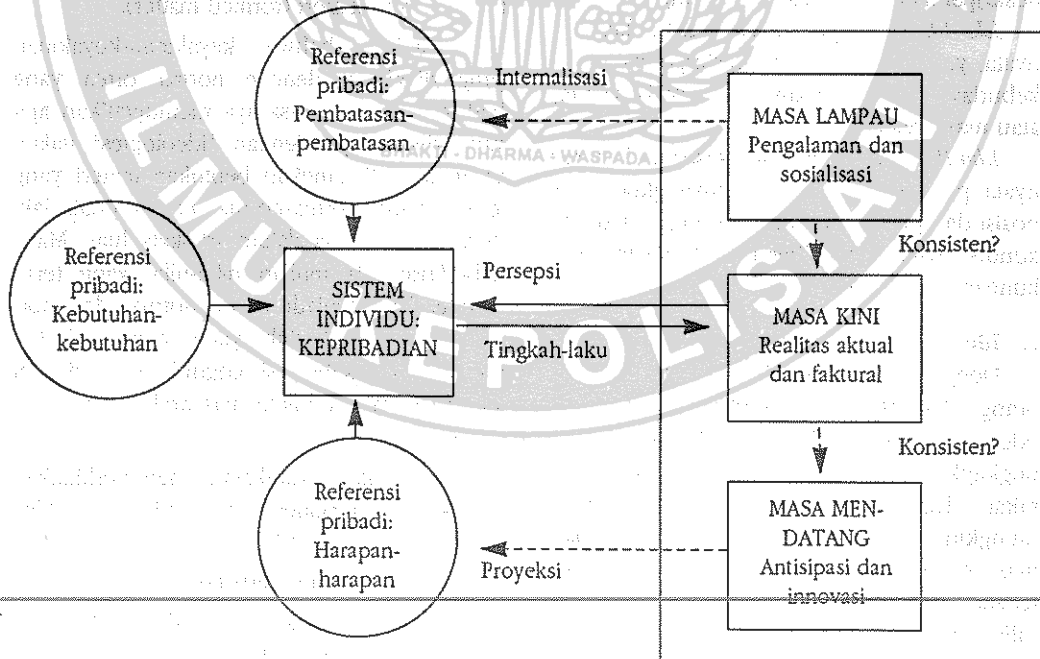
Dikatakan bahwa keyakinan-keyakinan yang dikaitkan dengan norma-norma yang berlaku itu pada dasarnya memunculkan apa yang disebutnya dengan "ideologies" dalam artian luas. Sedangkan bentukan materi yang terikat pada norma-norma adalah tidak lain "technology", juga dalam arti kata luas. Maka kebudayaan berintikan nilai-nilai yang telah mengendap menjadi norma-norma, dan norma-norma tersebutlah yang mewarnai kerangka serta substansi kognitif, pula derajat teknologi yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan.

Aspek kemasyarakatan memperlihatkan komponen-komponen yang berbeda (*Poplin*, 1960) seperti berikut ini:

- (1) adanya teritorium terbatas
- (2) adanya suatu keorganisasian kehidupan bersama (social order)
- (3) adanya nilai-nilai kolektif (collective values) yang tercermin di dalam kondisi solidaritas sosial.



KEPRIBADIAN DAN REFERENSI PRIBADI



KONDISI MENGENAI LINGKUNGAN



## KEPUSTAKAAN

Dengan asumsi dasar bahwa kondisi kemasyarakatan di Indonesia itu majemuk, bahkan "multidimensional-pluralistik", maka kiranya lebih relevan untuk berusaha melihat kondisi sosial-budaya masyarakat-masyarakat di Indonesia ini dari dua sudut terlepas dahulu, sebelum menarik kesimpulan-kesimpulan secara menyeluruh. Artinya, secara akademik dibutuhkan suatu pandangan mengenai kondisi budaya terlebih dahulu, diikuti oleh suatu pandangan mengenai kondisi sosial dengan menarik variabel-variabelnya tersendiri.

Baru pada tahap terakhir diusahakan suatu kajian mengenai derajat sinkronitas antara kedua aspek tersebut. Dengan demikian diperoleh berturut-turut "identitas budaya" dan "identitas sosial", yang kemudian diperbandingkan menurut kriterium keserasian. Hasil pengamatan dan analisa itu akan memperoleh makna yang lebih dalam dan lebih jauh, apabila ditinjau dengan suatu kerangka acuan konseptual. Persepsi harus didukung oleh konsepsi dan konsepsi perlu diisi dengan persepsi mengenai empiri hidup.

## PENUTUP

Uraian mengenai "kepribadian" individu dengan "Sistem Sosial" seperti telah dijabarkan di dalam paragraf-paragraf yang lalu itu lebih bersifat analistik konseptual. Titik berat diletakkan pada langkah-langkah deduksi, sehingga kesimpulan-kesimpulan sementara yang dengan implisit tetapi tersirat sudah dikemukakan itu masih mempunyai nilai proposisional

Mudah-mudahan ulasan tersebut itu dapat merangsang pemikir-pemikir lain untuk mengkaji kembali masalah-masalah yang tercakup di dalamnya, syukur apabila juga diikuti oleh usaha untuk menggali keabsahan dan kelainan konsepsi-konsepsi sementara itu.

- Bertalanffy, L. Von. 1968, *General System Theory*, Penguin Books.
- Bierstedt, R. 1970. *The Social Order*. MacGraw-Hill, NY.
- Boeke, J.H. 1942. *The Structure of the Netherlands Indian Economy*, NY.
- Boulding, K.E. 1956. "General System Theory – the Skeleton of Science". In: *General System*, Vol. I.
- Dean, Vera, 1957. *The Nature of the Non-western World*. Mentor Books, NY.
- Furnivall, J.S. 1939. *Netherlands India: A Study of Plural Economy*. Gambridge.
- Harsya W. Bachtiar. 1980. "Bhineka Tunggal Ika dalam Kebudayaan dan Masalah Kesatuan Bangsa". In: *Analisis Kebudayaan*, I. I, 1980.
- Haryati Soebadio, 1980, "Mencari Akar Kebudayaan nasional" In: *Analisis Kebudayaan*, I. I. 1980.
- Loomis, CH. P. 1960. *Social Systems*, Van Nostrand Coy, N.Y.
- Merton, R.K. 1949. *Social Theory and Social Structure*, N.Y.
- Mimpoeno, J.S. 1981. *Keperantaan dalam Konteks Budaya Indonesia*. Disertasi, Universitas Pajajaran, Bandung.
- Parsons, T. 1951. *The Social System*. The free Press, N.Y.
- Poplin, D.E. 1960. *Communities*, Mac Millan. N.Y.
- Soedjatmoko, 1967. "Indonesia: Problems and Opportunities". In: *Australian Outlook*, Vol. 21, 3, 275.
- Weber, M. 1976. "Social Action and Interaction". In: L.A. Coser & Resenberg (eds), *Sociological Theory*, 4<sup>th</sup> Edition, N.Y.